

PENGARUH PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS)

Lailatul Mukaromah 1)
Paulinus Ari 2)

- 1) Politeknik Negeri Sambas, Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan
- 2) Politeknik Negeri Sambas, Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan
ela.akp2020@gmail.com

Abstrak: Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas). Jenis penelitian ini adalah penelitian kasuatif (sebab dan akibat) dengan pendekatan Kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di setiap OPD yang berjumlah 43 OPD, dengan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling dimana responden nya adalah pegawai yang bekerja di bidang keuangan/akuntansi/tatausaha di setiap OPD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai signifikan 0,004 atau $> 0,05$, hal ini juga dibuktikan karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,988 < 2,987$), Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,018 atau $> 0,05$, hal ini juga dibuktikan karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,988 < 2,423$), dan Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,016 $> 0,05$, hal ini juga dibuktikan karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,988 < 2,458$), secara simultan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 33,692 lebih besar dari F tabel sebesar 3,105 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Abstract: The Influence of Regional Financial Management Principles, Regional Financial Accounting Systems and Understanding of Government Accounting Standards on the Quality of Regional Government Financial Reports. The purpose of this study was to determine the effect of the application of the Principles of Regional Financial Management, the Regional Financial Accounting System, and the Understanding of Government Accounting Standards on the Quality of Regional Government Financial Reports (Studies on the Regional Government OPD of Sambas Regency). This type of research is a casuative research (cause and effect) with a quantitative approach, the population in this study are all employees who work in each OPD, amounting to 43 OPD, with purposive sampling technique where the respondents are employees who work in the financial / accounting sector. / administration in each OPD The results of this study indicate that the principles of regional financial management have a positive effect on the quality of local government financial reports, with a significant value of 0.004 or > 0.05 , this is also proven because t table 0.05 , this is also proven because t table 0.05 , this is also proven right because t table.

Kata kunci : Pengelolaan, Keuangan, Akuntansi, Kualitas, Laporan, Pemerintah, Daerah.

Pemerintah Daerah sekarang ini telah dihadapkan dengan banyak nya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. (Hidayat, 2015) Tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah di sebabkan masyarakat yang sudah semakin sadar hak-hak politiknya. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, dan dorongan juga dengan majunya teknologi dan komunikasi, Informasi dan transportasi, sehingga masyarakat dengan mudah sementara itu pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur terhadap apa yang akan

dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang sudah dilakukan serta bagaimana akuntabilitasnya. Rafid dalam (Mardiasmo, 2002) Menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak sementara pertanggungjawaban tersebut.

Defitri (2018) menyatakan Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun Negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlakukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya, salah satunya informasi keuangan dalam bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Fatma (2017) Menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam pemerintahan daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas daerah. Laporan Keuangan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah juga akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Surjono dan Firdaus, (2017) Menyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan dan perhitungan APBD, dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketentuan tersebut pada intinya mengetengahkan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah dengan harapan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang mencakup antara lain: Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Perhitungan Anggaran, dan Neraca Daerah. Penelitian Prabangsari, (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ketika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. (Drama, 2014)

Salah satu informasi yang dilansir dalam website (<https://bpk.go.id/ihps>) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019 dari 542 LKPD Tahun Anggaran 2018 yang diperiksa BPK, sebanyak 99 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP, ditemukan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang disajikan dikarenakan terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup, permasalahan Sistem Pengendalian Intern dengan komposisi kelemahan struktur pengendalian intern 22%, Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 31 %, dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja 47% dan permasalahan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, BPK Mengungkapkan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan tersebut meliputi ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan sekurangnya penerimaan (berdampak financial) sebanyak 4.001 permasalahan sebesar Rp 2,19 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak pada financial) sebanyak 2.258 permasalahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi WTP hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas harus mempertahankan opini yang telah didapatkan, sehingga hasil dari penelitian ini akan menjadi informasi atau masukan bagi Pemerintah Daerah bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang harus di pertahankan, maka dari

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kasuatif (sebab dan akibat) yang melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen, dari variabel tersebut selanjut dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dirancang untuk menguji antara variabel independen yaitu Prinsip Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini mengambil objek seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat, dan Kantor di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas dengan teknik penentuan sampel Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan kepala bagian keuangan dan staf keuangan/Bendahara merupakan pihak yang terlihat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi total responden sebanyak 86 orang responden.

Penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini, yaitu prinsip pengelolaan keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X3) dan satu variabel terikat (variabel dependen) yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sambas. Hubungan kedua variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dalam penelitian ini baik secara parsial maupun simultan.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Daerah
X1	= Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan
X2	= Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
X3	= Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
A	= intercept atau konstanta
b1-b3	= Koefisien Regresi
e	= error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 1 dapat terlihat pada tabel 4.20, variabel Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan menerima H1 sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai t hitung sebesar 2,987 dan t tabel sebesar 1,988 dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan semakin baik penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Alasan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sambas, hal ini dikarenakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sambas hampir semuanya telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan baik diantaranya adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, Value for Money, kejujuran dan pengendalian dalam mengelola keuangan daerah. Walaupun penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah belum seluruhnya maksimal hal ini dapat dilihat dari temuan BPK tahun 2019 masih banyak permasalahan kepatuhan yang terjadi yaitu sebanyak 6.259 permasalahan yang terdiri dari penyimpangan informasi sebanyak 2.258 permasalahan, permasalahan kerugian sebanyak 2.642, permasalahan kekurangan penerimaan sebanyak 933, dan permasalahan potensi kerugian sebanyak 426. Walaupun demikian pengelolaan keuangan pemerintah daerah

kabupaten sambas telah berjalan dengan baik, ditandai dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini akan terus di pertahankan oleh pemerintah kabupaten sambas, Jadi Kesimpulan dalam penelitian ini adalah semakin baik penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis 2 dapat di dilihat pada tabel 4.20, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan menerima H2 sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai t hitung sebesar 2,423 dan t tabel 1,988 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Bab 1 pasal 1 ayat 83 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah, hal ini bisa dikatakan bahwa setiap instansi pemerintahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

3. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan menerima H3 sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai t hitung sebesar 2,458 dan t tabel sebesar 1,988 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan jika Pemahaman Standara Akuntansi Pemerintahan semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juha akan semakin baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seluruh pegawai keuangan yang berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

Adapun ringkasan hasil pengujian tiap-tiap hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

No.	Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Nilai Sig	Keterangan
H1	Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daeah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	2,987	1,988	0,004	Diterima
H2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	2,423	1,988	0,018	Diterima

H3	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	2,458	1,988	0,016	Diterima
H4	Prinsip pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	33,692	3,105	0,000	Diterima

Sumber : Data Primer yang diolah, (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H1), Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H2), Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H3), dan Prinsip pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H4) jadi hasil hipotesis dapat diterima atau terbukti.

SIMPULAN

Prinsip pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai t hitung sebesar 2,987 dan t tabel sebesar 1,988 dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan semakin baik penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sambas, karena pemerintah telah berusaha melakukan berbagai cara seperti memberikan sosialisasi/pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku dan juga sebagian besar staf atau pegawai di bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Sambas diasumsikan sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana menerapkan atau menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan. Secara garis besar menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi menggambarkan bahwa responden pada OPD telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik yang membuat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga baik. Hal ini juga dapat dilihat dari fakta yang terjadi pada Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sambas berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini sesuai dengan teori diatas yang menyatakan bahwa semakin baik sumber daya manusia nya dalam memahami akuntansi maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut data responden dalam penelitian ini yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi hanya sekitar 25% sedangkan 75% berasal dari jurusan lain, hal ini tampak bahwa anggapan untuk mengukur pemahaman seseorang dapat dilihat dari aspek latar belakang pendidikannya itu tidak sejalan dengan penelitian ini, walau pun latar belakang pendidikan akuntansi hanya 25% saja tetapi dari hasil jawaban responden yang telah sebagian besar menjawab setuju sehingga dapat diasumsikan bahwa sebagian besar pegawai/staf keuangan yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memahami tentang standar akuntansi pemerintahan daerah, hal ini juga didukung dengan data tentang lamanya bekerja pegawai/staf keuangan pada setiap OPD, ada sekitar 46 orang yang bekerja > 10 tahun, 15 orang selama 5-10 tahun, 19 orang selama 1-5 tahun, dan 4 orang selama < 1 tahun. Dari data tersebut tampak yang bekerja lebih dari 10 tahun lebih dominan dan yang bekerja dibawah satu tahun hanya 4 orang, bisa disimpulkan semakin lama pegawai itu bekerja maka pemahaman dan pengalamannya di bidang akuntansi semakin baik juga apa lagi di tambah dengan pelatihan dan sosialisasi tentang standar akuntansi pemerintahan.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aniftahudin. (2016) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir)*. Indragiri Hilir:Departement of Accounting, Faculty of Economics, Riau University.
- Antika. (2017) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Kepulauan Riau : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ardianti Mega. (2013) *Pengaruh Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Artana. (2016) *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2015) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015*. Dipetik Desember, 14, 2019. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2016) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2017) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017*. Dipetik Desember, 12, 2019. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2018) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2018*. Dipetik Desember, 14, 2019. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2019) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019*. Dipetik Desember, 12, 2019. <http://www.bpk.go.id>
- Defitri. (2018) *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Solok : Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Drama. (2014) *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening*. Padang : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Fatma. (2017) *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fatmala & Salisa. (2017) *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jepara : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus.
- Hidayat. (2015) *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Padang* : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Jari Ungu. (2017) *LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2016, Dipetik Desember, 12, 2019*. <http://jariungu.co>.
- Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Raih Opini WTP. Dipetik Desember, 10, 2019. www.sambas.co.id.
- Pemerintah Kabupaten Sambas (2019) *Daftar Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sambas (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)* Dipetik Desember, 11, 2019. www.sambas.co.id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permadi. (2015) *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung : Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.

- Prabangasari. (2018) *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Variabel Intervening*. Surakarta : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sanjaya. (2017) *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Saputri. (2018) *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada BKD Kabupaten Boyolali)*, Surakarta : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Semester 1 Tahun 2016. Dipetik Desember, 12, 2019. <http://www.bpk.go.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfa Beta. Bandung.
- Surjono, Firdaus. (2017) *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*. Bandung.
- Tribun Pontianak. (2019) *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Berhasil Raih Predikat WTP*. Dipetik Desember 12, 2019. <http://Pontianak.tribunnews.com>.
- Wikisource.(2015) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah. Dipetik Desember, 20, 2019. http://id.wikisource.org/wiki/undang_undang_dasar_negara_republik_indonesia_tahun_1945.
- Yuliani, dkk (2010) *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sumatera Utara : Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala.